

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi digital pada bidang kepegawaian dan keuangan di Kecamatan Margomulyo telah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi dibandingkan sistem manual. Namun, sistem tersebut belum mampu mewujudkan sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan secara optimal karena belum terdapat integrasi antar aplikasi, masih adanya proses administrasi manual, serta faktor kedisiplinan pengguna dalam memperbarui data. Oleh karena itu, pengembangan integrasi sistem informasi antar aplikasi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi digital di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Efektivitas penerapan sistem administrasi digital di Kecamatan Margomulyo telah berjalan dengan baik. Penggunaan aplikasi SIMANTAP, SIMGAJI, SIPD, MyASN, dan e-Kinerja mampu mempercepat proses administrasi, memudahkan pencarian dokumen kepegawaian, serta mengurangi penggunaan arsip fisik. Namun demikian, efektivitas sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan belum optimal karena perubahan data pegawai masih harus disampaikan secara manual kepada bendahara untuk diperbarui pada aplikasi penggajian.

Efisiensi administrasi mengalami peningkatan dibandingkan sistem manual karena waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat dan penggunaan dokumen fisik berkurang. Akan tetapi, efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena belum adanya integrasi antar aplikasi sehingga masih terjadi penginputan data secara berulang (double entry) pada SIMANTAP, SIMGAJI, dan SIPD.

Kecukupan sistem administrasi digital telah mampu mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian maupun administrasi keuangan sesuai fungsi masing-masing aplikasi. Namun, sistem belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi dalam mewujudkan sinkronisasi data secara otomatis antarbidang karena setiap aplikasi masih berjalan secara mandiri (stand alone).

Pemerataan manfaat digitalisasi telah dirasakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pembagian hak akses aplikasi dilakukan berdasarkan fungsi jabatan sehingga keamanan data tetap terjaga. Selain itu, pelayanan administrasi diberikan kepada seluruh pegawai tanpa membedakan status kepegawaian, baik PNS maupun PPPK.

Responsivitas organisasi dalam menghadapi kendala administrasi digital telah berjalan dengan baik. Gangguan jaringan internet maupun aplikasi dapat diatasi melalui koordinasi antar pegawai, penggunaan jaringan alternatif, serta pembagian tugas antara operator dan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Namun demikian, respons sistem terhadap

perubahan data pegawai masih bergantung pada proses penyampaian informasi secara manual.

Ketepatan administrasi digital telah meningkat dibandingkan sistem manual, khususnya pada proses kenaikan gaji berkala yang dapat diselesaikan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Sebaliknya, penyesuaian gaji akibat kenaikan pangkat maupun perubahan data keluarga belum selalu tepat waktu karena dipengaruhi oleh waktu penerbitan Surat Keputusan, prosedur administrasi, belum terintegrasinya aplikasi, serta keterlambatan penyampaian informasi oleh pegawai.

Berdasarkan keenam indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi digital di Kecamatan Margomulyo telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan. Namun, tujuan digitalisasi untuk mewujudkan sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan secara otomatis belum sepenuhnya tercapai karena belum terdapat integrasi antar aplikasi yang digunakan serta masih adanya proses administrasi manual dalam pelaksanaannya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Perlu meningkatkan koordinasi antara bagian kepegawaian dan bagian keuangan dalam setiap perubahan data pegawai agar penyesuaian hak keuangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, perlu dibuat mekanisme pengingat (reminder) atau daftar monitoring terhadap

pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, maupun perubahan data keluarga sehingga keterlambatan pembaruan data dapat diminimalkan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui perangkat daerah yang berwenang diharapkan dapat mengembangkan integrasi antara aplikasi SIMANTAP, SIMGAJI, SIPD, dan MyASN sehingga perubahan data kepegawaian dapat diperbarui secara otomatis pada sistem administrasi keuangan. Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.

3. Bagi Pegawai

Pegawai diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan setiap perubahan data kepegawaian, seperti perubahan status perkawinan, penambahan anggota keluarga, maupun perubahan data pribadi lainnya kepada operator kepegawaian. Ketepatan penyampaian informasi akan mendukung akurasi data administrasi serta ketepatan pembayaran hak keuangan pegawai.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai integrasi sistem administrasi pemerintahan berbasis digital dengan melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah atau membandingkan implementasi sistem administrasi digital pada instansi pemerintah lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi (2022), *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Keuangan Daerah.
- Aini, 2019 Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, 1(1), 43. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671>
- Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew. 2014. The Second Machine Age. New York: W.W. Norton.
- Dunn, W. N. (2004). Public Policy Analysis: A Political Economy Approach. Pearson Education.
- Eko Indrajit, Richardus. (2002). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro. 2024. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP Unigoro*. Bojonegoro: FISIP Unigoro.
- Indrajit, R. E. (2002). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Andi.
- Jones, C. O. (2002). Dampak Kebijakan. Charles O. Jones 2002.
- Kaufirman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi beberapa model (dalam Subarsono, 2005, 189) Subarsono AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian PANRB (2018) Kementerian PANRB. (2018). Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Warfield, Terry D.. 2018. Intermediate Accounting. Hoboken: Wiley.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook (3rd ed). SAGE Publications Inc.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage: California.

- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok Husni & Attalina Syailin Nichla Choirin, (2022) Mubarok Husni, & Attalina Syailin Nichla Choirin. (2022). Studi fenomenologi peran guru sekolah dasar sebagai fasilitator dalam pembelajaran tematik dikelas tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 75–87.
- Mulyanto Agus, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Negroponte, Nicholas. 1995. *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf.
- Noe, Raymond A., Hollenbeck, John R., Gerhart, Barry, & Wright, Patrick M.. 2017. *Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage*. New York: McGraw-Hill Education.
- OECD. 2019. *Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives*. Paris: OECD Publishing
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Putra, A. B., Nasution, I., & Yahfizham, Y. (2024). Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah menengah pertama islam terpadu madani. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 435. <https://doi.org/10.29210/1202424376>.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus* (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Sedarmayanti. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama: Bandung.

- Shafritz dan Russel dikutip oleh Keban (2014:6-7) Keban, Yermias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: PT. Gavamedia.
- Sondang P. Siagian. (2008). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharso, D. D. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Semarang: Widya Karya. Suharso, 2005:136, 136.
- Susanto, A. (n.d.). Sistem Informasi Manajemen.
- Sutopo, A. H. (2010). Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie (2011:31), John M. Pffifner dan Robert V.Presthus Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Van Horne, James C. & Wachowicz Jr., John M.. 2008. Fundamentals of Financial Management. New Jersey: Prentice Hall.
- Wicaksono, S. R. (2023). Konsep dasar *e-government*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Winarta et al., 2020 Winarta, W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42